



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILIK HENRY RISTANTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 224480

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.295.100.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.125.900.000
2. Tanah Seluas 286 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 629.200.000
3. Bangunan Seluas 18 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 570.000.000
4. Bangunan Seluas 18 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, Rp. 570.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 188.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI OUTLANDER Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 410.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	871.396.468
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	238.646.516
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.264.288
Sub Total	Rp.	7.008.907.272
III. HUTANG	Rp.	615.113.462
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.393.793.810

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.